

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia; Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*
(Bandung: Refika Aditama 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
(Bandung: Alfabeta, 2009)

Sudarsono, *Kamus Hukum*,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Suparman Usmar, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)

Habib Adjie (I), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*,
(Bandung: Refika Aditama, 2011)

Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*,
(Jakarta: Milenia Populer 2001)

Edmon Makarim, 2014, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Sudarsono, *Kamus Hukum*,
(Jakarta: Rineka Cipta 2012)

R.A Emma Nurita., S.H., M.Kn, *Cyber Notary; Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*,
(Bandung: Refika Aditama, 2012)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

H. Riduan Syahrani, *Edisi Revisi Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*
(Bandung: Penerbit Alumni, 2013)

Ridwan Kahirandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governence: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum*

(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*,
(Jakarta: Djambatan, 2004)

H.Ikhsan Lubis, *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS terkait konsep cyber notary*
(Jakarta: Pranada Media, 2022)

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006*
(Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2006)

Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*
(Bandung: Refika Aditama, 2017)

Subekti S.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata*
(Jakarta: Intermasa, 2017)

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*
(Jakarta: Prenamedia Group, 2012)

Subekti, *Aneka Perjanjian*
(Bandung: Citra Aditya-Bakti, 2014)

Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)

Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007; Tentang RUPS Perseroan terbatas (Non-Tbk) secara Video Conference oleh Notaris (VICON)*
(Bandung: Refika Aditama, 2022)

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum dalam Ekonomi*
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*
(Bandung: Logoz Publishing, 2014)

Sudarsono, *Kamus Hukum*
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Jeroen Chrorus, *Introduction to Dutch Law*
(Netherlands: Kluwer Law International, 2006)

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*.
(Yogyakarta: Centre for documentation and Studies of Business Law,
2003)

Yane Mayasari, *Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik*, Bunga Rampai
Jurnal Teknologi Infomasi (JALTI)
(Bandung: Politeknik Praktisi Bandung Vol 6, 2022)

B. Peraturan Perundang-undangan

Digital Signature Act of South Korea Legislation Research institute
“Digital Signatrue Act” Act No 5792, Feb 5,1999 Latest Ammdened by
Act 14577, March 2017

Electronic Signature Law People Republic of China “ESL of PRC” 2004 with
significant revisions in 2015 and latest by 2019
[http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-
12/05/content_1381960.htm](http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/05/content_1381960.htm)

Uniform Electronic Transaction, United States of America Act 1999

Electronic Records and Signatures in Commerce
“Electronic Signatures in Global and National Commerce Act” Public Law
106-229, June, 30 2000

Undang-undang No 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun
2014

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

C. Jurnal

J.H.A Logeman dan CJ Resink dan Husain Achmad,
Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif

Ahmad Budi Setiawan “Studi Standarisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik”, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a6>

Ardison Asri “Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>

Abdul Rahman Praja Negara “The Doctrine of Piercing the Corporate Review in The Court Decision
No. 656/PDT.G/2015/PN.MDN, DOI: 10.25041/iplr.v2i2.2310

D. Media Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Penggunaan Tanda Tangan Digital di Indonesia Tumbuh Pesat”.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13751/penggunaan-tanda-tangan-digital-di-indonesia-tumbuh-pesat/0/sorotan_media , diakses pada 11 Juni 2023

Djelas.id, “Kapan Pertama Kali Istilah Tanda-tangan Digital Dicetuskan”.
<https://www.djelas.id/kapan-pertama-kali-istilah-tanda-tangan-digital-dicetuskan/#:~:text=Tidak%20lama%20setelah%20gagasan%20tersebut,pertama%20kali%20pada%20tahun%201977> , diakses pada 09 Juni 2023

Press Release Kontan, “Industri Tanda Tangan Elektronik Terus Tumbuh”.
<https://pressrelease.kontan.co.id/news/industri-tanda-tangan-elektronik-terus-tumbuh> , diakses pada 09 Juni 2023

Kata Data, “Industri Tanda Tangan Digital Terus Melonjak Saat Corona Tetapi ada 3 Hambatan”.
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60f80acee163c/adopsi-tanda-tangan-digital-melonjak-saat-corona-tapi-ada-3-hambatan> , diakses pada 09 Juni 2023

Market and Markets, “Digital Signature Market”.
<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-signature-market-177504698.html> , diakses pada 09 Juni 2023

Blog Privy.id, “Sejarah Tanda Tangan Digital”.
https://blog.privy.id/sejarah-tanda-tangandigital/?gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqUF5WK7OdNhF73vJ4er1Zqg4WOAIY-4M1CRjMgZ XKDBTjvxIV6t_LhoCXCKQAvD_BwE , diakses pada 09 Juni 2023

Pengguna Tanda Tangan Digital di Indonesia “Pengguna Tanda Tangan Digital di Indonesia Tumbuh Pesat”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13751/penggunaan-tanda-tangan-digital-di-indonesia-tumbuh-pesat/0/sorotan_media diakses pada 10 Juni 2023

PT Privy Identitas Digital, “PSrE Non-Instansi”
<https://te.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb> diakses pada 15 Juli 2023

Definisi Metode
<https://kbbi.web.id/metode> ditelusuri pada tanggal 25 November 2022

RUPS Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas “Rapat Umum Pemegang Saham Bagian I” <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/rapat-umum-pemegang-saham-bagian-i/> diakses pada 15 Juli 2023

Peran *Fiduciary of Duty* “*definition of fiduciary duty*”
<https://definitions.uslegal.com/b/breach-of-fiduciary-duty/> diakses pada 10 Juli 2023

Perubahan yang memerlukan Persetujuan Kementerian Hukum dan Ham “Kuorum RUPS Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuorum-rups-perubahan-direksi-dan-dewan-komisaris-1t544b29dc1ab82/> diakses pada 15 Juli 2023

Syarat sahnya Perjanjian “4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> diakses pada 15 Juli 2020

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, dalam tulisan Bambang Kesowo, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum No.:24/VII/Maret/1996, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum No.:24/VII/Maret/1996, diakses pada 10 Juli 2023

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Hendry Zamora,
Notaris wilayah Provinsi Jawa Barat, Jakarta, tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.00 wib

Hasil wawancara dengan Kemal Hadju,
Notaris di Kabupaten Karawang, Jakarta, tanggal 15 Mei 2023 Pukul 13.00 wib

Hasil wawancara dengan Setiadji, Kepala Divisi Kepatuhan,
PT Uangme, Jakarta tanggal 16 Mei 2023 Pukul 15:00 wib

Hasil wawancara dengan Nicole Zheng, *SEA Legal Director*,
Superatom Group, Beijing, tanggal 17 April 2023 Pukul 18:00 wib